



Perjanjian Kinerja

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Yasonna H. Laoly

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

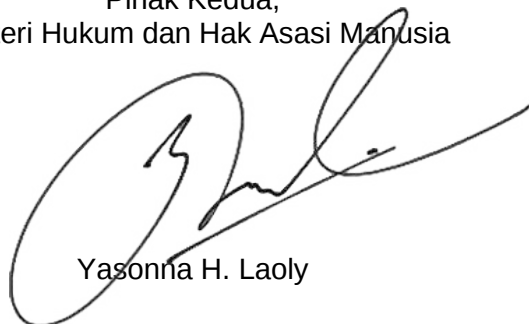
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

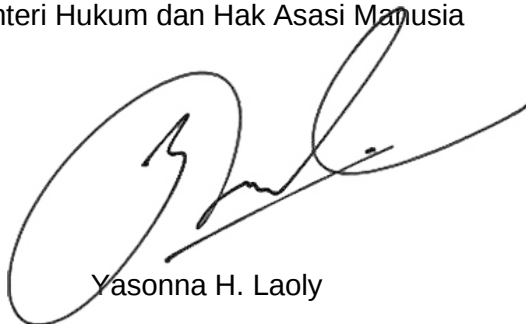
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Baik (65,00 – 79,99/ 2,4 Indeks)
2.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 55.316.655.000,-
1.	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 3.403.982.000,-
2.	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 2.415.872.000,-
3.	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 2.409.318.000,-
4.	Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 2.351.057.000,-
5.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp. 9.475.780.000,-
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 35.260.646.000,-

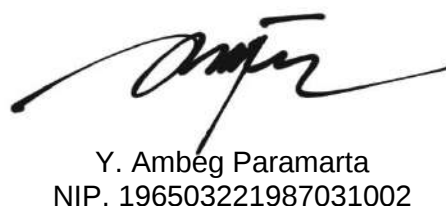
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamaruli Manihuruk
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan dan Penegakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jamaruli Manihuruk
NIP. 196703301991031001

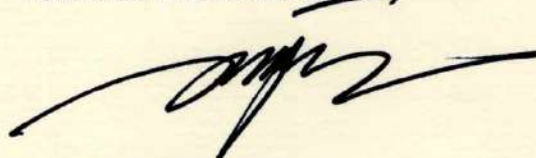
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI
KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80 %
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Predikat Istimewa (90-100)

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 3.403.982.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp 3.403.982.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan
dan Penegakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia



Jamaruli Maninuruk
NIP. 196703301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamaruli Manihuruk
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan dan Penegakan Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Jamaruli Manihuruk
NIP. 196703301991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bertua Irene Situmeang
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jamaruli Manihuruk
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

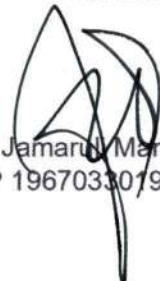
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan
dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia


Jamaruli Manihuruk
NIP 196703301991031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
Strategi Kebijakan Pembentukan dan
Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

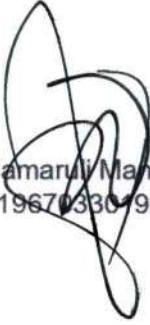

Bertua Irene Situmeang
NIP 196802122001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Laporan (LKjIP)

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan
dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia


Jamaruli Mahihuruk
NIP 196703301991031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Pembentukan dan Penegakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Bertua Irene Situmeang
NIP 196802122001122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Yuliani

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Yuliani
NIP. 196907221998032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80 %
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kategori Baik (65,00-79,99)

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.415.872.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp 2.415.872.000,-

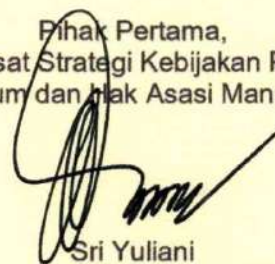
Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Yuliani
NIP. 196907221998032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Yuliani

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Sri Yuliani
NIP. 196907221998032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leny Triswirly
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Yuliani
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Sri Yuliani
NIP. 196907221998032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Pelayanan Hukum
dan Hak Asasi Manusia


Leny Triswirly
NIP. 197309052003122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Laporan (LKjIP Pusat)

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Yuliani
NIP. 196907221998032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Pelayanan Hukum
dan Hak Asasi Manusia



Leny Triswirly
NIP. 197309052003122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata
Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

Syarifuddin
NIP. 197112182002121001

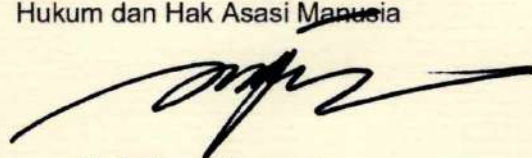
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80 %
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM	80%

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.409.318.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp 2.409.318.000,-

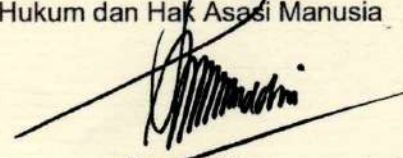
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Syarifuddin
NIP. 197112182002121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata
Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

Syarifuddin

NIP. 197112182002121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Yustika
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Syarifuddin
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata
Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia



Syarifuddin
NIP 197112182002121001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Tata Kelola Hukum
dan Hak Asasi Manusia



Mutia Yustika
NIP 197610132006042001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Laporan (LKjIP)

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Syarifuddin
NIP 197112182002121001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Tata Kelola Hukum
dan Hak Asasi Manusia


Mutia Yustika
NIP 197610132006042001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN INFORMASI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofli
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

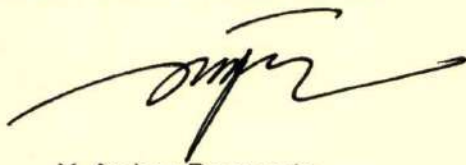
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Informasi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia


Nofli
NIP. 196903091992031002

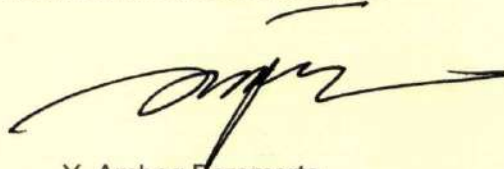
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN INFORMASI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI
KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80 %
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel
		3. Jumlah pemanfaatan data SIPKUMHAM untuk identifikasi isu kebijakan di wilayah	33 laporan identifikasi isu kebijakan
2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	1. Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	81%
		2. Jumlah jurnal yang diusulkan dalam indeksasi internasional bereputasi	1 Jurnal
3.	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penggerak (<i>enabler</i>) layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tingkat ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)	98%
4.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.351.057.000,-
Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp 2.351.057.000,-

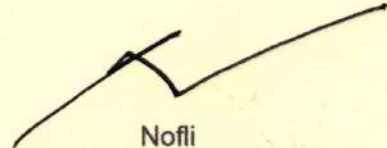
Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Informasi Kebijakan Hukum
dan Hak Asasi Manusia



Nofli
NIP. 196903091992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN INFORMASI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofli

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Maret 2024

Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Informasi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Nofli

NIP. 196903091992031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novie Evlina

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nofli

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

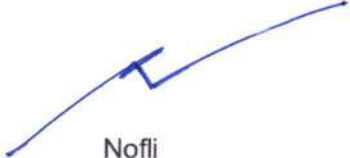
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Informasi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia


Nofli
NIP 196903091992031002

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum
dan Hak Asasi Manusia


Novie Evlina
NIP 198811032010122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Laporan (LKjIP)

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Informasi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia


Nofli
NIP 196903091992031002

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum
dan Hak Asasi Manusia


Novie Evlina
NIP 198811032010122003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

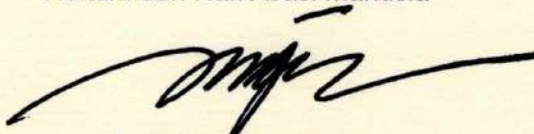
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

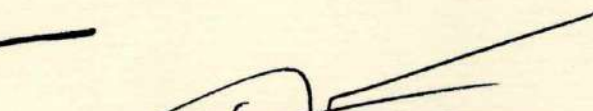
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 35.260.646.000,-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp 35.260.646.000,-

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

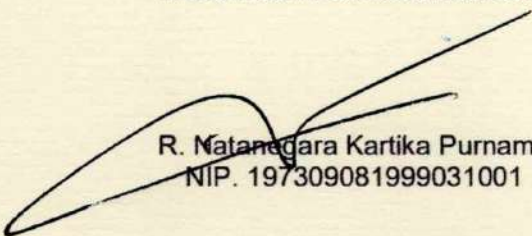
Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evy Setyowati Handayani
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Program dan Pelaporan

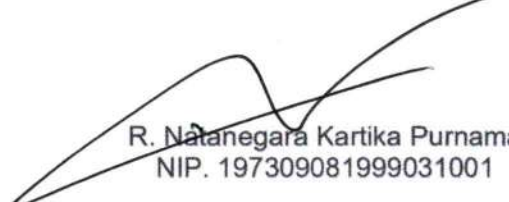
Evy Setyowati Handayani
NIP 197804032001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

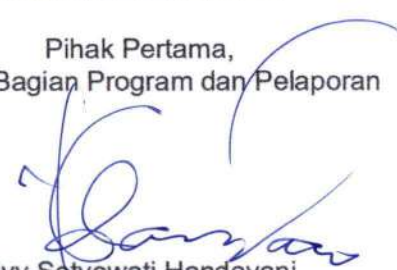
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan perencanaan dan penganggaran	3,1
		3. Persentase capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	90%

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Program dan Pelaporan


Evy Setyowati Handayani
NIP 197804032001122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heny Widyawati
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Umum

Heny Widyawati
NIP 197601312001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan umum	3,1

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Umum



Heny Widyawati
NIP 197601312001122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Prasetyo
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heny Widyawati
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum

Heny Widyawati
NIP 197601312001122001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Rumah Tangga

Ibnu Prasetyo
NIP 198604252005011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kerumahtanggaan	3,1

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum



Heny Widyawati
NIP 197601312001122001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Rumah Tangga



Ibnu Prasetyo
NIP 198604252005011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Sri Dwijayanti

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Heny Widyawati

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum

Heny Widyawati
NIP 197601312001122001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pimpinan dan Protokol

Yuni Sri Dwijayanti
NIP 199106092010122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan tata usaha pimpinan dan keprotokolan	3,1

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum



Heny Widyawati
NIP 197601312001122001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pimpinan dan Protokol



Yuni Sri Dwijayanti
NIP 199106092010122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kesy Warsiningsih
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Madya

Kesy Warsiningsih
NIP 196504201985032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

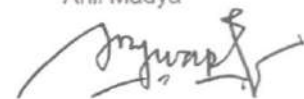
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kepegawaian	3,1

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Madya


Kesy Warsiningsih
NIP 196504201985032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Azanita
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Madya

Cut Azanita
NIP 196606041994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

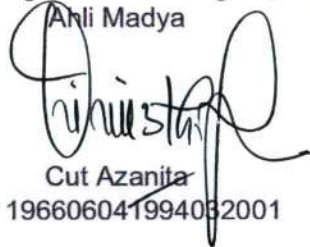
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan keuangan	3,1

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Anli Madya


Cut Azaniza
NIP 196606041994032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fransisca Puspitaning Ari
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli
Pertama

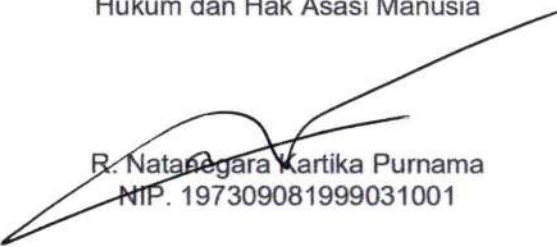

Fransisca Puspitaning Ari
NIP. 199303242020122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kehumasan	3,1

Jakarta, 27 Maret 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia


R. Natanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001

Pihak Pertama,
Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Pertama


Fransisca Puspitaning Ari
NIP 199303242020122001